

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Mappetahang Fatwa, "*Potret Konsitusi Pasca Amandemen UUD 1945*", Jakarta, Buku Kompas, hlm. 45.
- Lukman Surya Saputra, "*Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*", Bandung, Setia Purna Inves, 2017 hlm. 29.
- Bintan R Saragih. Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8
- Bintan R Saragih, Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, PT RajaGrafindo Persada, hlm 58
- Denny Indrayana, Strategi memenangkan sengketa pemilu Di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kompas 2019) Hlm.25. Dalam bukunya Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 8.
- Rahmat Bagja, Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian sengketa proses pemilu*, PT Rajagrafindo persada, Hlm 62
- Teguh Prasetyo, "*Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*". Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 132.
- Saldi Isra Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis, prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm 75
- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 125
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 207.
- Sri Kusriyah, *Negara Hukum dan Konstitusi*, Unissula Press, halaman 29.
- Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, (Ed), 2014, *Integritas Pemilu 2004, Kajian Pelanggaran, kekerasan, dan penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, (Jakarta;Kemitraan Partnership, 2014), Hlm 36.
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL. UGM.2009), hlm.12
- Global Commision on Elections, Democracy and Security (2012). *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk meningkatkan Integritas Pemilihan Umum diseluruh Dunia*, Laporan dari Komisi Global untuk Pemilihan Umum, demokrasi dan keamanan, September 2012, hlm.6

- Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2008), hlm.26
- UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), halaman 122
- Dina Sujana, 1989, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, h. 4.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.52-53.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.
- HB Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, h.37.
- A Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm 68.
- Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm.207
- Amir Machmaud, *Demokrasi Undang-Undang Peran Rakyat*, Jakarta, Prisma, no 8, 1983, LP3S, Halaman, 17.
- Henry B Mayo, *An Introduction To Democratisation Theory*, New York, Oxford University Press, 1960, hlm. 70
- Sobagio, 2009, *Distorsi Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*” Dalam Jurnal Mukara, Sosial Humaniora, Vol. 13. No 2, Desember 2009, Hal 111-116.
- Larry Diamond and Leonard Morlino, Dalam bukunya Amy Y.S. Rahayu Vishnu juwono, *Birokrasi & Governance, teori, konsep dan Aplikasinya*, 2019, PT Rajagrafindo Persada Depok Hlm 2.
- C.S.T.Knsil, *Tata Kehidupan Bernegara*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hlm 11.
- Dahlan Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 98.
- Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN, FH UI, 1988, hlm 333.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Op.Cit, hlm 461.
- Bunjamin Alamsyah, *Pemilu Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia*. Bandung Batic Press, 2010, hlm 37-38.
- Gunawan Suswantoro, *Mengawal penegak demokrasi di balik tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Erlangga, 2016, halaman 171.
- Imam Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Daar El-Kitab Al-Araby, Beirut, hlm 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 3 Tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan Karya.

UU No 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1975.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

JURNAL

Sufi Hamdani Kurniawan, Sri Kusriyah Kusriyah, 2019, *Revitalization program of the market in improving infrastructure development and partisipation of the market traders*, dalam jurnal Daulat hukum, Vol2. No 3 September 2019, published by master of law faculty of law UNISSULA.

Adhe Ismail Ananda, Sri Kusriyah, 2020, **The Role Of Regional/city Governments in Developping And Supervising Of Village Regulation**, dalam jurnal Daulat hukum vol 3, no 3, (2020), September 2020. published by master of law faculty of law UNISSULA

INTERNET

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/03/140000669/indonesia-menganut-teori-kedaulatan-rakyat?page=all>. Di akses tanggal 9 Juni 2019 14.05

<http://kkbi.web.id/peran> diakses tanggal 9 Juni 2019 14.58.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia#:~:text=Pemilihan%20umum%20di%20Indonesia%20menganut,langsung%20dan%20tidak%20boleh%20diwakilkan.akses tanggal 15 Juni 2020.12.21.